

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Artantojati Sigit, 2010, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jakarta: Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Cahaya Suhandi dan Surachmin, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dempster Quentin, *Whistleblower*, 2006, Jakarta: Elsam.
- Djaja Ermansyah, 2000, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2000, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- _____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanitijo Ronny, Soemitro, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, 2007, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hiariej Eddy Os , 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Iksan Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhamadiyah University Pers.
- K. Wantjik Saleh, 2000, *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty.
- Makarao Mohammad Taufik 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Mahmud Marzuki Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- _____ 2014, *Penelitian hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Media Prenada Group t.
- Prints Darwin, 2000, *Hukum Acara Pidana dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, (edisi ke 2).
- Projodikuro Wirjono, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Projohadimidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Bandung: Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, 2009, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasangka Hari dan Lilly Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak Nicolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suli Suhandi Cahaya dan Surachmin, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Listiani Lies, 2014, Al., *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Surodibroto Soenarto, 2007, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: Radjagrafindo Persada,
- Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2008, Jakarta: (edisi ke 2), UI-Pres.
- Suratman dan Philips, 2012 *Metode Penelitian Alfabet*, Bandung: Sinar Grafika.
- Syamsudin,M, 2007, *Operasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wijaya Firman, 2008, *Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta: Maharini Press.

B. Jurnal Ilmiah

- Febri Diansyah, *Kematian Whistleblower*, dari <http://news.okezone.com/read/2011/03/31/58/440804/kematian-whistleblower> diakses pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 01.46 WIB.
- Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13Tahun 2006 tentang Perlindungan*

Saksi dan Korban, Tesis: Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Santoso Topo, 2011, *Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang.

Widodo Essyono Supriyadi, Wahyu Wagiman dan Zaenal Abidin, *Analisis Terhadap RUU Perlindungan Saksi dan Korban versi Badan Legislatif DPR*, diakses pukul 00.21 WIB tanggal 2 Januari 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, 1982, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. TLN Nomor 3209.

Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Indonesia, 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) Puslitbang Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

D. Putusan

Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst

E. Internet

<http://news.detik.com/read/2011/10/11/225302/1741925/10/> “Peraturan Justice Collaborator di Indonesia” Diakses pukul 06.18 WIB pada tanggal 28 November 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/12/17/18445841/OC.Kaligis.Divonis.5.5.Tahun.Penjara> Diakses pukul 07.32 WIB pada tanggal 19 Desember 2018

<https://www.kompasiana.com/lahagu/55a722bbb49373a6208fa7ee/7-dampak-psikologis-moral-atas-tersangkanya-oc-kaligis> diakses pada pukul 23.39 WIB, tanggal 26 Desember 2018

Berita SatuPublished on Juli 15 youtub.com, 2015”Pengacara Otto Cornelis Kaligis mengatakan telah mengingatkan M Yagari Bhastara alias Gerry untuk tidak berurusan dengan uang terkait kasus suap tiga Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara di Medan.” Diakses pada pukul 21.12 WIB tanggal 29 desember 2018

<https://walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/UU-No-31-Tahun-2014-ttg-perlindungan-saksi-dan-korban.pdf> diakses pada pukul 06.16 tanggal 27 Desember 2018.

<https://www.jawapos.com/hukum-kriminal/12/06/2016/hakim-tolak-justice-collaborator-berdampak-negatif-pengungkapan-korupsi> diakses pada pukul 11.50 WIB tanggal 31 Desember 2018

<https://lpsk.go.id/peraturan/lpsk/16> diakses pada pukul 01.26 tanggal 29 Desember 2018

https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/2302 diakses pada pukul 23.21 WIB tanggal 1 Januari 2018

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan-meringankan-mahkota-dan-alibi/> diakses pada pukul 17.33 WIB tanggal 2 Januari 2019.

<http://news.detik.com/read/2011/10/11/225302/1741925/10/> Diakses pukul 17.53 WIB tanggal 2 Januari 2019.

<https://www.kompasiana.com/www.etzcoy.blogspot.com/5b562b9bbde575068c110794/mencari-akar-masalah-korupsi-yang-dilakukan-pejabat?page=all> diakses pada 27 Februari 2019 Pukul 10.33 WIB.

Puteri Hikmawati, *UPAYA PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI* diakses pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 11.11 WIB.

Anwar Ibrahim Aji, *“Peringatan Hukuman Bagi Justice Collaborator”* diakses pada tanggal 3 Februari 2019, Pukul 02.00 WIB.

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, diakses pada tanggal 5 februari 2019 pukul 20.00 WIB.

<https://www.bphn.go.id/> “Suap di Dunia Pendidikan sebagai tindak Pidana di Bidang Pendidikan” diakses tanggal 23 Februari 2019 Pukul 13.03.WIB.

https://www.academia.edu/32194432/Justice_collaborator_dalam_sema diakses pukul 13.18 WIB pada 25 Maret 2019.

<https://dokumen.tips/documents/sistem-pembalikan-beban-pembuktian-dalam-libuiacidfilefiledigital20304878-t30695.html> diakses pukul 13.10 WIB pada 25 Maret 2019

https://www.academia.edu/35148931/ANALISIS_YURIDIS_KEKUATAN_PEMBUKTIAN_PENILAIAN_HAKIM_TENTANG_KETERANGAN_SEORANG_SAKSI_DI_DALAM_PROSES_PERADILAN_PIDANA_DITINJAU_DARI_KITAB_UNDANG-UNDANG_HUKUM_ACARA_PIDANA diakses pukul 13.05 WIB pada 25 Maret 2019.

https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA diakses pukul 12.51 WIB pada 25 Maret 2019.

S Dwiputriani, “Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Understanding the Strategy for Eradicating Corruption in the Case of Indonesia)” diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 18.30 WIB.

<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi> diakses pukul 12.38 WIB pada 25 Maret 2019.

<http://theconversation.com/korupsi-sebabkan-2-krisis-ekonomi-di-indonesia- kapan-bangsa-ini-mau-belajar-103523> diakses pukul 12.36 WIB tanggal 25 Maret 2019